

# **PT HARTA DJAYA KARYA**

**Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2021 Dan 2020**  
**Dan**  
**Laporan Auditor Independen/**  
*Financial Statements*  
*For The Years Ended*  
*December 31, 2021 And 2020*  
**And**  
*Independent Auditors' Report*

	<u>Halaman/ Page</u>	
<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b>		<b><i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i></b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>		<b><i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i></b>
<b>Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020</b>		<b><i>Financial Statements For The Years Ended December 31, 2021 and 2020</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1 – 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi	3	<i>Statements of Profit or Loss</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5 – 6	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 – 85	<i>Notes to Financial Statements</i>
	*****	



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2021  
PT HARTA DJAYA KARYA**

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Richie Adrian Hartanto  
Alamat Kantor : Jl. Bintaro Raya No. 8A, RT 01/RW 10, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Sawo Manila No. 19, RT 08 RW 10, Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
No. Telepon : (021) 27937979  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Harta Djaya Karya.
2. Laporan keuangan Entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Entitas telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Entitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2023



**HARTA DJAYA KARYA**  
Richie Adrian Hartanto  
Direktur

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**INDEPENDENT AUDITORS'S REPORT**

Laporan No. 00014/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023

Report No. 00014/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  
**PT Harta Djaya Karya**

Shareholders, Director Commissioners, Directors  
**PT Harta Djaya Karya**

**Opini**

**Opinion**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Harta Djaya Karya ("Entitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the financial statements of PT Harta Djaya Karya ("the Entity"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of the Entity as at December 31, 2021, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis Opini**

**Basis for Opinion**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Hal Lain**

**Other Matters**

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independent lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 2 Maret 2023.

The financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2021 ad for the year then ended, were audited by other independent auditors who expressed a modified opinion on such financial statements on March 2, 2023.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines in necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity's financial reporting process.*

#### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance in a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's internal control.*

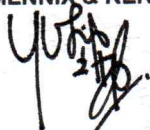


- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
  - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
  - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
  - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity to cease to continue as a going concern.*
  - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**MENNIX & REKAN**



**Yudianto Prawiro Silianto**  
Nomor Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant*  
Registration Number AP. 1286  
Surabaya, 28 April 2023 / *April 28, 2023*



00014

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan bank	2c, 2e, 4	2.722.658.509	919.807.215	Cash on hand and in banks
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	2c, 2f, 5	1.050.189.682	495.010.000	Third parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	2c, 2f, 6	3.981.802.032	10.676.013.813	Third parties
Pihak berelasi	2c, 2d, 2f, 6, 25	632.133.969	432.481.098	Related parties
Uang muka subkontraktor	2, 7	1.863.223.061	-	Advances to subcontractor
Biaya dibayar di muka	2h, 8	68.550.000	35.550.000	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	2l, 9, 26	31.817.337	-	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		<u>10.350.374.590</u>	<u>12.558.862.126</u>	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset pajak tangguhan	2l, 26	97.615.320	73.820.780	Deferred tax assets
Aset hak guna	2n, 10	89.291.669	82.083.335	Right of used assets
Aset tetap – neto	2i, 11	1.008.574.549	628.099.735	Fixed assets – net
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.195.481.538</u>	<u>784.003.850</u>	Total Non-Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>11.545.856.128</u></u>	<u><u>13.342.865.976</u></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank	2c, 12	4.400.000.000	6.376.968.924	Short-term bank loan
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	2c, 13	353.941.068	353.323.650	Third parties
Beban yang masih harus dibayar	2c, 14	73.942.922	-	Accrued expenses
Utang pajak	2l, 26	576.716.977	375.857.943	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current portion of long-term liabilities
Lembaga keuangan bukan bank	2c, 15	2.090.714.313	2.887.860.839	Financial institution non bank
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>7.495.315.280</b>	<b>9.994.011.356</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas jangka panjang – dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term liabilities – less current portion
Lembaga keuangan bukan bank	2c, 15	105.701.245	60.559.142	Financial institution non bank
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2m, 16	443.706.000	335.549.000	Estimated liabilities for employee benefits
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>549.407.245</b>	<b>396.108.142</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>8.044.722.525</b>	<b>10.390.119.498</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				Capital stock – par value Rp 1,000,000 per share
Modal dasar – 4.000 saham				Authorized – 4,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.000 saham pada tahun 2021 dan 2020	2o, 17	2.000.000.000	2.000.000.000	Issued and fully paid – 2,000 share in 2021 and 2020
Saldo Laba		1.571.046.563	952.746.478	Retained earning
Komponen ekuitas lainnya	2m, 18	(69.912.960)	-	Other equity components
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>3.501.133.603</b>	<b>2.952.746.478</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>11.545.856.128</b>	<b>13.342.865.976</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**PT HARTA DJAYA KARYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
<b>PENDAPATAN</b>	2k, 19	9.626.404.475	7.794.110.663	<b>REVENUE</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2k, 20	(4.909.809.821)	(4.348.116.030)	<b>COSTS OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA BRUTO</b>		4.716.594.654	3.445.994.633	<b>GROSS PROFIT</b>
Pendapatan lain-lain	2k, 21	421.678.553	949.070.057	Other income
Beban penjualan	2k, 22	(206.063.483)	(307.173.308)	Selling expenses
				General and administrative
Beban umum dan administrasi	2k, 23	(2.432.753.929)	(2.132.783.868)	expenses
Beban lain-lain	2k, 24	(1.482.514.132)	(1.287.502.809)	Other expenses
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK</b>		1.016.941.663	667.604.705	<b>PROFIT BEFORE PROVISION FOR TAX EXPENSE</b>
<b>TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK</b>	2l, 26	(398.641.578)	(320.501.653)	<b>PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSE)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		618.300.085	347.103.052	<b>GAIN FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN</b>				<b>OTHERS COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>				<b>ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:</b>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	2m, 18, 26	(89.632.000)	-	Actuarial gain (loss)
Pajak penghasilan terkait		19.719.040	-	Related income tax
<b>JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>		(69.912.960)	-	<b>Sub-total</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN</b>		548.387.125	347.103.052	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen ekuitas lainnya/Other Equity Component	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2020	2.000.000.000	605.643.426	-	2.605.643.426	<i>Balance as of January 1, 2020</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	-	347.103.052	-	347.103.052	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2020	2.000.000.000	952.746.478	-	2.952.746.478	<i>Balance as of December 31, 2020</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	-	618.300.085	(69.912.960)	548.387.125	<i>Comprehensive income (loss) for the year</i>
Saldo 31 Desember 2021	2.000.000.000	1.571.046.563	(69.912.960)	3.501.133.603	<i>Balance as of December 31, 2021</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Laba sebelum pajak	1.016.941.663	667.604.705	<i>Profit before tax</i>
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak menjadi kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas operasi			<i>Adjustments to reconcile income (loss) before provision for tax income (expense) to net cash provided by (used in) operating activities</i>
Cadangan penurunan nilai piutang	258.611.760	367.400.000	<i>Allowance for impairment of receivables</i>
Penyusutan	181.060.455	58.121.797	<i>Depreciation</i>
Imbalan kerja	18.525.000	118.310.000	<i>Employee benefits</i>
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	1.475.138.878	1.211.436.502	<i>Operating Profit Before Changes in working capital</i>
Penurunan (Kenaikan)			<i>Decrease (Increase)</i>
Piutang usaha	(813.791.442)	601.896.694	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	(654.026.713)	(652.066.265)	<i>Other receivables</i>
Uang muka kontraktor	(1.863.223.061)	-	<i>Contractor advance</i>
Biaya dibayar dimuka	(33.000.000)	179.342.000	<i>Prepaid expenses</i>
Pajak dibayar dimuka	(31.817.337)	-	<i>Prepaid tax</i>
Aset hak guna	(7.208.334)	(32.083.335)	<i>Right of used assets</i>
Kenaikan (Penurunan)			<i>Increase (Decrease)</i>
Utang usaha	617.418	(438.381.761)	<i>Trade payables</i>
Beban yang masih harus dibayar	73.942.922	(100.156.470)	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	(201.858.044)	(712.656.391)	<i>Taxes payables</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.055.225.713)	57.330.974	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penambahan (pengurangan) piutang lain-lain	7.148.585.624	(690.595.738)	<i>Addition (deduction) of other receivables</i>
Pembelian aset tetap	(561.535.270)	(506.676.374)	<i>Purchased of fixed assets</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	6.587.050.354	(1.197.272.112)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>			<b>CASH FLOW FROM</b>
<b>PENDANAAN</b>			<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan (pembayaran) utang bank	(1.976.968.924)	808.676.623	<i>Addition (payment) bank loan</i>
Penambahan (pembayaran) utang jangka panjang	(752.004.423)	457.419.981	<i>Addition (payment) non current liabilities</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.728.973.347)	1.266.096.604	<i>Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities</i>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	1.802.851.294	126.155.466	<b>INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	919.807.215	793.651.749	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	2.722.658.509	919.807.215	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.*

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**1. GENERAL**

**a. Pendirian Entitas**

PT Harta Djaya Karya (Entitas) didirikan berdasarkan Akta Notaris Musa Muamarta., S.H., No. 27, tanggal 22 November 2012. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0111407.AH.01.09. Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn No. 50, tanggal 27 Oktober 2021. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00188569.AH.01.11 Tahun 2021, tanggal 29 Oktober 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas terutama bergerak dalam bidang pengembang, jasa design interior dan perdagangan. Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012.

Entitas berdomisili di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Kantor pusat Entitas beralamat di Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240.

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris	:	Rama Permana	:
<u>Direktur</u>			
Direktur Utama	:	Richie Adrian Hartanto	:

**a. The Entity's Establishment**

*PT Harta Djaya Karya (the Entity) was established based on the Notarial Deed of Musa Muamarta., S.H., No. 27, dated November 22, 2012. The establishment deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU-0111407.AH.01.09. Tahun 2012, dated December 26, 2012.*

*The Entity's Articles of Association have been amended several times, latest by Notarial Deed No. 50 dated October 27, 2021 of Janty Lega, S.H., M.Kn. This notarial deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU-00188569.AH.01.11 Tahun 2021, dated October 29, 2021.*

*In accordance with Article 3 of the Entity's Articles of Association, the scope of activities of the Entity is mainly to engage in the field of developer, interior design service and trading. The Entity started its commercial operations on 2012.*

*The Entity is domiciled in Kebayoran Lama Selatan, South Jakarta. The Entity's head office is located at Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240.*

**b. The Board of Commissioners, Directors and Employees**

*The members of the Entity's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

<u>Board of Commissioners</u>
Commissioner
<u>Directors</u>
President Director



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

---

Jumlah karyawan Entitas adalah 27 dan 26 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

*The Entity has 27 and 26 permanent employees as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

**a. Statement of Compliance**

*Management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, and have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute.*

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**b. Basis of Preparation of Financial Statements**

*The financial statements except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.*

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

*Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.*

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.*

Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

*The statements of cash flows were presented using the indirect method, by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.*

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp).

*The functional and presentation currently used in the financial statements is Indonesian Rupiah (Rp).*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dan efek material terhadap laporan keuangan:

- PSAK No. 22 (Amendemen 2019), mengenai "Kombinasi Bisnis".

Amendemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, Amendemen PSAK No. 22 tersebut, adalah:

- a. mengamendemen definisi bisnis.
- b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis.
- c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantive yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan *output*.
- d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity' accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

*The implementation of the amendment, improvement and interpretations standards which are effective on January 1, 2021 did not result in significant changes to the accounting policies of the Entity and Subsidiaries and no material effect on the financial statements:*

- *PSAK No. 22 (Amendment 2019), regarding "Business Combination".*

*These amendments clarify the definition of business for the purpose of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition. In general, the amendments to PSAK No. 22 include:*

- a. amend the definition of business.*
- b. added an optional concentration test that allows a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business.*
- c. clarified the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs.*
- d. add illustrative guidance and examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- Amendemen PSAK No. 71, amendemen PSAK No. 55, amendemen PSAK No. 60, amendemen PSAK No. 62 dan amendemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2*.

Reformasi acuan suku bunga mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian *Interbank Offered Rates* (“*IBOR*”) dengan acuan suku bunga alternative, penggantian *IBOR* dibagi menjadi dua tahap yaitu:

1. Tahap 1 (Masalah Pra-penggantian).
2. Tahap 2 (Masalah penggantian).

- PSAK No. 110, mengenai “Akuntansi Sukuk” dan PSAK No. 111, mengenai “Akuntansi Wa’d”.

Penyesuaian ini memberikan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi pada sukuk. Penyesuaian ini bertujuan untuk menelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk perolehan sukuk. Penyesuaian terhadap PSAK No. 110 berdampak pada PSAK No. 111: Akuntansi Wa’d yang merujuk pada PSAK No. 110.

- PSAK No. 112, mengenai “Akuntansi Wakaf”.

Secara umum PSAK No. 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK No. 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

- *Amendments to PSAK No. 71, amendments to PSAK No. 55, amendments to PSAK No. 60, amendments to PSAK No. 62 and amendments to PSAK No. 73 regarding Interest Rate Reference Reform - Phase 2 is adopted from IFRS concerning Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.*

*The interest rate reference reform refers to the global reform which agrees to replace Interbank Offered Rates (“IBOR”) with an alternative interest rate reference, the replacement of IBOR is divided into two stages:*

- 1. Stage 1 (Pre-replacement issues).*
- 2. Stage 2 (Replacement issues).*

- *PSAK No. 110, regarding “Accounting for Sukuk” and PSAK No. 111, regarding “Wa’d Accounting”.*

*This adjustment provides clarification on the initial recognition of an investment in a sukuk. This adjustment aims to harmonize and maintain consistency of arrangements for the acquisition of sukuk. Adjustments to PSAK No. 110 has an impact on PSAK No. 111: Wa’d Accounting which refers to PSAK No. 110.*

- *PSAK No. 112, regarding “Wakaf Accounting”.*

*In general, PSAK No. 112 regulates the accounting treatment of waqf transactions carried out by both nazhir and wakif in the form of organizations and legal entities. PSAK No. 112 can also be applied by individual nazhir.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

c. Instrumen Keuangan

Entitas melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas menerapkan pertimbangan

c. Financial Instruments

The Entity has applied PSAK No. 71, regarding "Financial Instruments".

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as follows:

1. Financial assets measured at amortized cost;
2. Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and
3. Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Entity assess the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity apply



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Model Bisnis

Entitas menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Entitas tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Entitas tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa

*judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.*

*In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as FVTPL.*

Business Model Assessment

*The Entity determine its business model at the level that best reflects how it manages the Entity's financial assets to achieve its business objective.*

*The Entity business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:*

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the Entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity' assessment.*

*The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from original expectations, the Entity does not change the classification of the remaining*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Kecuali piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas secara praktis. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

*financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.*

*Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.*

*At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.*

*Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment Loss".*

*With the exception of trade and other receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity has applied the practical expedient. All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.*

*Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity have applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

*Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from end of reporting period, otherwise they are classified as non-current.*

Subsequent Measurement

*The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:*

- (i) *Financial assets measured at amortized cost*

*Financial assets measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are also recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Effective interest rate method

*The effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

*Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at FVTPL.*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

*As of December 31, 2021 and 2020, financial assets measured at amortized cost consist of cash on hand and cash in banks, trade receivables and other receivables.*

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (ii) *Financial assets measured at fair value through profit or loss*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*Financial assets measured at FVTPL are subsequently carried in the statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Dividen atas investasi diakui sebagai "Pendapatan Operasional Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika hak pembayaran telah ditetapkan.

*Dividends on investments are recognized as "Other Operating Income" in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the right of payment has been established.*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

*As of December 31, 2021 and 2020, the Entity has no financial assets measured at FVTPL.*

- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- (iii) *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*

Keuntungan dan kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pembalikan, dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode EIR. Ketika instrumen utang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

*Fair value gains and losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method. When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*As of December 31, 2021 and 2020, the Entity has no financial assets measured at FVOCI.*

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Pengakuan Awal

Initial Recognition

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

*Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows:*

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. *Financial liabilities measured at amortized cost; and*
2. *Financial liabilities measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).*

Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

*The Entity determine the classification of financial liabilities at initial recognition.*

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

*Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.*

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan setelah periode pelaporan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

*Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months after the reporting period, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.*

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

*The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:*

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (i) *Financial liabilities measured at amortized cost*

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur

*Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha, beban masih harus dibayar dan utang lembaga keuangan non bank.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Entitas yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Gains or losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

As of December 31, 2021 and 2020, financial liabilities measured at amortized cost consist of short-term bank loan, trade payables, accrued expenses and non financial institution loan non bank.

- (ii) Financial liabilities measured at FVTPL

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition measured at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Entity that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK No. 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Entitas tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

*As of December 31, 2021 and 2020, the Entity has no financial liabilities measured at FVTPL.*

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas atau pihak lawan.

Offsetting of Financial Instruments

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity or the counterparty.*

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Entitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Entitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Impairment of Financial Assets

*At each reporting date, the Entity assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Entity compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.*

Untuk piutang usaha dan piutang lain-lain, Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit yang diharapkan. Entitas mengakui penyisihan kerugian

*For trade receivable and other receivable, the Entity apply a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity recognize a loss allowance based on lifetime*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

berdasarkan estimasi kerugian kredit seumur hidup pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit yang diharapkan dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kehilangan kredit historis Entitas, disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup telah diakui kemudian membaik, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12-bulan yang diharapkan dari kerugian kredit pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan sederhana.

Entitas mengakui rugi penurunan nilai (pembalikan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian

*expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.*

*When the credit risks on financial instruments for which lifetime expected credit losses have been recognized subsequently improves, and the requirement for recognizing lifetime expected credit losses is no longer met, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-months expected credit losses at the current reporting period, except for assets for which simplified approach was used.*

*The Entity recognize impairment loss (reversals) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statements of financial position.*

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets

*A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

"*pass-through*"; dan baik (a) Entitas telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Entitas menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

*either (a) the Entity have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Entity have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.*

Financial liability

*A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Fair Value of Financial Instruments

*The Entity measure financial instruments, including derivatives, at fair value at each statements of financial position date.*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

*The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity .*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

Pengukuran nilai wajar atas aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

*A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.*

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* relevan yang tidak dapat diobservasi.

*The Entity use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

*All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:*

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Entitas menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi

*For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on recurring basis, the Entity determine whether transfers have occurred between levels in the*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

*hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.*

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

*For the purpose of fair value disclosures, the Entity have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.*

Penyesuaian Risiko Kredit

Credit Risk Adjustment

Entitas melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

*The Entity adjust the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's own credit risk associated with the instrument is taken into account.*

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

d. Transactions with Related Parties

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

*The Entity has transactions with entities that are regarded as having special relationships as defined by PSAK No. 7 (Revised 2015), regarding "Related Parties Disclosures".*

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

*Related parties represents a person or an entity who is related to the reporting entity:*

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
- (i) has control or joint control over the reporting entity;
  - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- (i) the entity's and reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
  - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity, if the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
  - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
  - (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
  - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity, or to the parent of the reporting entity.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

All balances and significant transactions with related parties, whether or not conducted under the normal terms and conditions similar to those transacted with parties, are disclosed in the notes to the financial statements.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

e. Kas dan Bank

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Penurunan nilai piutang terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Entitas tidak mampu untuk menagih kembali jumlah piutang usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah pencadangan atas penurunan nilai adalah perbedaan antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif. Jumlah pencadangan ini diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

g. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

e. Cash on hand and in Banks

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in bank, and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash on hand and in banks are not pledged as collaterals for liabilities and others loans and not restricted.

f. Trade Receivables and Other Receivables

Receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. An allowance for impairment loss of receivables is established when there is objective evidence that the Entity will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. The amount of the allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The amount of the allowance is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

g. Inventories

According to PSAK No. 14, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan ditetapkan berdasarkan penelaahan berkala terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

*Allowance for inventory losses, obsolescence or decline in stock value, based on a review of the physical condition and inventory turnover.*

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

h. Prepaid Expenses

*Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.*

i. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

i. Fixed Assets

*According with PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.*

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

*Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:*

	<u>Tahun/ Years</u>	
Kendaraan	4-8	Vehicles
Peralatan Proyek	4	Project equipments
Peralatan kantor	4	Office equipments

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

*Land rights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, which ever is shorter.*

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses

*The cost of the construction of assets is capitalized as construction in progress. Interest and other borrowing cost, such as fees on loans used in financing the construction of*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

**j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

*a qualifying assets, are capitalized up to the date when construction is completed. These costs are reclassified into fixed assets account when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.*

*Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective fixed assets account when completed and ready for use.*

*Cost of repairs and maintenance is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized.*

*When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.*

**j. Impairment of Non-Financial Assets**

*According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at statement of financial position dates, the Entity review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Perkiraan jumlah yang dapat dipulihkan kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari aset non-keuangan (*unit* penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (*unit* penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other income.*

k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban

k. Revenue from Contracts with Customer and Expenses

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas telah menerapkan PSAK No. 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

*On January 1, 2020, the Entity have applied PSAK No. 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:*

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimate the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

*promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

*A performance obligation may be satisfied at the following:*

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Entity select an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

*Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.*

Aset kontrak

Contract asset

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Jika Entitas melaksanakan dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk memperoleh imbalan yang bersyarat.

*Contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Entity perform by transferring of goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for earned consideration that is conditional.*

Liabilitas kontrak

Contract liabilities

Kewajiban kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Entitas telah menerima imbalan (atau jumlah pembayaran jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Entitas mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kontrak diakui pada saat

*Contract liabilities is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Entity have received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the Entity transfer goods or services to the customer, a contract liability is recognized*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Entitas melaksanakan kontraknya.

Entitas mempertimbangkan apakah ada janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi (misalnya jaminan, poin loyalitas pelanggan). Dalam menentukan harga transaksi untuk penjualan barang dagang, Entitas mempertimbangkan pengaruh dari pertimbangan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan (jika ada).

i. Pertimbangan variabel

Jika imbalan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Entitas mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi haknya sebagai imbalan atas pengalihan barang kepada pelanggan. Pertimbangan variabel diestimasi pada awal kontrak dan dibatasi hingga kemungkinan besar bahwa pembalikan pendapatan yang signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel kemudian diselesaikan.

ii. Komponen pembiayaan yang signifikan

Entitas menerima pembayaran uang muka dari pelanggan tertentu untuk penjualan barang dagang dengan *lead time* produksi selama satu (1) tahun setelah penandatanganan kontrak penerimaan pembayaran. Terdapat komponen pembiayaan yang signifikan untuk kontrak-kontrak ini mengingat lamanya waktu antara pembayaran pelanggan dan pengiriman barang, serta tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, harga transaksi untuk kontrak-kontrak ini didiskontokan, menggunakan tingkat bunga yang tersirat

when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognised as revenue when the Entity perform under the contract.

The Entity consider whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g. warranties, customer loyalty points). In determining the transaction price for the sale of goods, the Entity considers the effects of variable consideration, existence of significant financing component, noncash consideration, and consideration payable to the customer (if any).

i. Variable consideration

If the consideration in a contract includes a variable amount, the Entity estimates the amount of consideration to which it will be entitled in exchange for transferring the goods to the customer. The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until it is highly probable that a significant revenue reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the associated uncertainty with the variable consideration is subsequently resolved.

ii. Significant financing component

The Entity receives advance payments from certain customers for the sale of goods with a manufacturing lead time of one (1) years after signing the contract receipt of payment. There is a significant financing component for these contracts considering the length of time between the customers' payment and the transfer of the goods, as well as the prevailing interest rate in the market. As such, the transaction price for these contracts is discounted, using the interest rate implicit in the contract (i.e., the interest rate that discounts the cash



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

dalam kontrak (yaitu, tingkat bunga yang mendiskontokan harga jual yang dibayarkan di muka). Tarif ini sepadan dengan tarif yang akan tercermin dalam transaksi pembiayaan terpisah antara Entitas dan pelanggan pada awal kontrak.

Entitas menerapkan kebijaksanaan praktis untuk uang muka jangka pendek yang diterima dari pelanggan. Artinya, jumlah imbalan yang dijanjikan tidak disesuaikan dengan pengaruh komponen pembiayaan yang signifikan jika jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan dan pembayarannya adalah 1 tahun atau kurang.

iii. Pertimbangan *non-cash*

Entitas mengestimasi nilai wajar dari imbalan non-tunai dengan mengacu pada harga pasarnya. Jika nilai wajar tidak dapat diestimasi secara wajar, maka imbalan non tunai diukur secara tidak langsung dengan mengacu pada harga jual barang dagang yang berdiri sendiri.

Beban

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

1. Pajak Penghasilan

Entitas menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2018), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

*selling price to the amount paid in advance). This rate is commensurate with the rate that would be reflected in a separate financing transaction between the Entity and the customer at contract inception.*

*The Entity apply the practical expedient for short-term advances received from customer. That is, the promised amount of consideration is not adjusted for the effects of a significant financing component if the period between the transfer of the promised goods or services and the payment is one (1) year or less.*

iii. *Non-cash consideration*

*The Entity estimate the fair value of the non-cash consideration by reference to its market price. If the fair value cannot be reasonably estimated, the non-cash consideration is measured indirectly by reference to the stand-alone selling price of goods.*

Expenses

*Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decrease of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.*

1. Income Taxes

*The Entity adopted PSAK No. 46 (Revised 2018), regarding "Income Taxes", which requires the Entity to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the financial statements.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

**m. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja**

Entitas mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan PSAK No. 24, mengenai "Imbalan Kerja", dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020.

Undang-undang Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada

*Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date.*

*Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.*

*Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Entity appealed against, when the results of objection has been set.*

**m. Estimated Liabilities for Employee Benefits**

*The Entity recognize an unfunded employee benefit liability in according to PSAK No. 24, regarding "Employee Benefits", and Labor Law No. 11 Year 2020.*

*The Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.*

*The liability recognized in the statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

*defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.*

Entitas mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*The Entity recognize all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

*Past-service costs are recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.*

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

*Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.*

n. Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas melakukan penerapan PSAK No. 73, mengenai "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan hak aset sewa dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi".

n. Leases

*On January 1, 2020, the Entity has applied PSAK No. 73, regarding "Leases", which set the requirements for the recognition of right-of-use asset and lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as "operating lease".*

Sebagai Penyewa

As a Lessee

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

*At the inception of a contract, the Entity assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Entitas harus menilai apakah:

- Entitas memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas memiliki hak ini ketika mereka memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Entitas memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Entitas telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Entitas mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Entitas bertindak sebagai penyewa, Entitas memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

i. Aset hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity shall assess whether:

- The Entity has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Entity has the right to direct the use of the asset. The Entity have this right when they have the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:
  1. The Entity has the right to operate the asset;
  2. The Entity has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Entity are a lessee, the Entity have elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

i. Right-of-use assets

The Entity recognize a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to be incurred in dismantling and removing the underlying asset or to restore the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Aset hak-guna aset selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

*Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.*

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa, sebagai berikut:

*The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term, as follows:*

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	1-4	<i>Buildings</i>

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

*If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity will exercise a purchase option, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.*

Entitas menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

*The Entity apply PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.*

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas menerapkan PSAK No. 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

*When a contract includes lease and non-lease components, the Entity apply PSAK No. 72 to allocate the consideration under the contract to each component.*

ii. Liabilitas sewa

ii. Lease liability

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Entitas menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

*borrowing rate. Generally, the Entity use their incremental borrowing rate as the discount rate.*

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

*Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:*

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Entitas cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

- *fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the Entity are reasonably certain to exercise that options; and*
- *payment of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.*

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif.

*Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period using the effective interest method.*

Entitas menyajikan "Aset hak-guna" dan "Liabilitas sewa" terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

*The Entity present "Right-of-use assets" and "Lease liabilities" are presented separately in the financial position.*

Sewa Jangka Pendek

Short-term Leases

Entitas memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang asset dasarnya bernilai rendah. Entitas mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis

*The Entity has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Entity recognize the lease payments associated with these leases as an expense on*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

*a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.*

Modifikasi Sewa

Lease Modification

Entitas mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

*The Entity account for a lease modification as a separate lease if both:*

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Entitas :

- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Entitas pada tanggal efektif modifikasi;

*For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Entity:*

- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Entitas mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Entity's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Entity recognize any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease in profit or loss; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai Pesewa

Ketika Entitas bertindak sebagai pesewa, Entitas mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa Entitas membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi.

Ketika Entitas adalah pesewa antara, Entitas mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Entitas. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

*Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "general and administrative expenses" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

As a Lessor

*When the Entity act as a lessor, they shall classify each of their leases as either an operating lease or a finance lease.*

*To classify each lease, the Entity make an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.*

*When the Entity are an intermediate lessor, they account for the head lease and the sublease as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.*

*Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.*

*Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Entity's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Entity's net investment outstanding in respect of the leases.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

o. Modal

Modal saham merupakan nilai nominal yang telah diterbitkan pada akhir periode pelaporan.

Tambahan modal disetor merupakan setiap premi yang diterima atas penerbitan modal saham. Setiap biaya transaksi yang berkaitan dengan penerbitan saham dikurangkan pada tambahan modal disetor, setelah dikurangi pajak penghasilan yang terkait.

Saldo laba mencakup semua hasil tahun berjalan dan sebelumnya seperti yang diungkapkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

p. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

q. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Entitas pada periode pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa akhir tahun yang tidak disesuaikan diungkapkan dalam laporan keuangan pada saat material.

o. Equity

*Capital stock represents the par value of shares that have been issued at the end of the reporting period.*

*Additional paid-in capital includes any premium received on the issuance of capital stock. Any transaction costs associated with the issuance of shares are deducted from additional paid-in capital, net of any related income tax benefits.*

*Retained earnings includes all current and prior results as disclosed in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

p. Basic Earnings Per Share

*In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings Per Share", basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to Entity's ordinary stockholders by the weighted average number of shares outstanding during the period/year (less treasury stock).*

q. Event After the Reporting Period

*Post year-end event that provide additional information about the Entity's position at reporting period (*adjusting event*) are reflected in the financial statements. Post year-ended events that are not adjusting event are disclosed in the financial statements when material.*

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

*The preparation of financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

*revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.*

**Estimasi dan Asumsi**

***The Estimated and Assumptions***

Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

*The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:*

- a. Estimasi provisi kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha dan piutang lain-lain.

- a. *Estimating provision for expected credit losses of trade and other receivables.*

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

*The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Entity use judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity's and' relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity's receivables to amounts that they expect to collect.*

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

*These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity also recognize a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.*

Entitas menerapkan pendekatan sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha, piutang lain-lain, dan investasi jangka pendek. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam

*The Entity apply simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivable and other receivables, and short-term investment. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan atas persediaan usang, jika ada, diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan tersebut. Entitas memiliki pengalaman dalam mengevaluasi persediaan dengan mempertimbangkan kegunaan dari persediaan tersebut. Entitas akan mengevaluasi dan menilai kondisi tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

c. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukkan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4-8 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

*credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.*

b. Allowance for Inventories Obsolescence

*Allowance for inventories obsolescence, if any, is estimated based on fact and situation, including but not limited on, physical condition of inventory. The Entity have experiences in evaluating inventories with considering benefits from inventories. The Entity will evaluate and measure that condition at every reporting date.*

c. Depreciation of Fixed Assets

*The management of Entity reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.*

*Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.*

*The costs of fixed assets and are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 4-8 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

d. Pajak Penghasilan

Entitas beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

e. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

f. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan

d. Income Taxes

*The Entity operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will recorded at the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.*

e. Employee Benefits

*The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.*

*Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.*

f. Impairment of Non-Financial Assets

*At the end of each reporting period, the Entity reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas memanfaatkan pasar *input* dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. *Input* yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana *input* dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk *input* yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain *input* level 1.
- Level 3: Teknik penilaian untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari *input* yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian

value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

g. Fair Value Measurements

A number of assets and liabilities included in the Entity's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Entity's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).
- Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.
- Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat di observasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan termasuk pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

*techniques including discounted cash flow model. The inputs to these model are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgement include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.*

h. Pemulihan dari aset pajak tangguhan

Entitas melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Entitas atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Entitas di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Entitas dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

h. Recoverability of deferred tax assets

*The Entity reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Entity's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Entity's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Entity will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.*

i. Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang

i. Uncertain tax exposure

*In certain circumstances, the Entity may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Entitas membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

Entitas mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak dan denda di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan :

1) Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi. Entitas memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur

*uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK 46, "Income Taxes". The Entity make an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized.*

*The Entity present interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in tax and fine expense in the statements profit or loss and other comprehensive income.*

**Significant Accounting Judgments in Applying the Entity Accounting Policies**

*In the process of applying the Entity's policies, management has made the following judgment, apart from those involving estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:*

1) *Business model assessment*

*Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model solely for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity determine the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Entity monitor financial assets measured*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki.

Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif ke arah itu, klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

2) Peningkatan risiko kredit yang signifikan

ECL diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL seumur hidup untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

3) Perbedaan antara properti investasi dan properti yang ditempati pemilik

Entitas menentukan apakah suatu properti memenuhi syarat sebagai properti investasi. Dalam membuat pertimbangan, Entitas mempertimbangkan apakah properti tersebut menghasilkan arus kas yang sebagian besar terlepas dari aset lain yang dimiliki oleh suatu entitas. Properti yang ditempati sendiri

at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reason are consistent with the objective of the business for which the asset was held.

Monitoring is part of the Entity's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

2) Significant increase in credit risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stages 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks has increased significantly since initial recognition. PSAK No. 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity take into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information. Management assessed that there has no significant increase in credit risk on the Entity's financial assets for the years ended December 31, 2021 and 2020.

3) Distinction between investment properties and owner-occupied properties

The Entity determine whether a property qualifies as an investment property. In making its judgement, the Entity consider whether the property generates cash flow largely independent of the other assets held by an entity. Owner-occupied properties generate cash flows that are attributable not



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

menghasilkan arus kas yang dapat diatribusikan tidak hanya ke properti tetapi juga ke aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau pasokan.

- 4) Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - *Lessee*

Entitas menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika dipastikan secara wajar akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika dipastikan tidak akan dilakukan secara wajar.

Entitas memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Entitas menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah cukup yakin apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa atau tidak. Artinya, ia mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Entitas menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendalinya dan memengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan (misalnya, konstruksi kontrak perbaikan hak milik yang signifikan atau penyesuaian yang signifikan pada aset yang disewakan).

*only to property but also to the other assets used in the production or supply process.*

- 4) *Determining the lease term of contract with renewal and termination option – Lessee*

*The Entity determine the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.*

*The Entity have several lease contracts that include extension and termination options. The Entity apply judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate lease. That is, it consider all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Entity reassess the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate (e.g., construction of significant leasehold improvements or significant customization to the leased asset).*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN BANK**

**4. CASH ON HAND AND IN BANKS**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
<u>Kas</u>	682.300	543.900	<u>Cash on hand</u>
<u>Bank</u>			<u>Cash in banks</u>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.366.193.008	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	270.091.852	352.691.470	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	85.691.349	566.571.845	PT Bank Central Asia Tbk
Sub-jumlah	2.721.976.209	919.263.315	Sub-total
Jumlah	2.722.658.509	919.807.215	Total

Tidak terdapat saldo kas dan bank kepada pihak berelasi.

*There are no cash on hand and in banks to related parties.*

**5. PIUTANG USAHA**

**5. TRADE RECEIVABLES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

a. Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

*a. Details of trade receivables based on customers are as follows:*

	2021	2020	
<u>Pihak ketiga:</u>			<u>Third parties:</u>
PT Kayu Raya Indonesia	626.011.760	367.400.000	PT Kayu Raya Indonesia
PT Hastari Abhipraya Prima	462.000.000	-	PT Hastari Abhipraya Prima
PT Pilar Karya Perkasa	288.235.222	-	PT Pilar Karya Perkasa
PT Birotika Semesta	168.300.000	-	PT Birotika Semesta
PT Global Furnika Mandiri	131.654.460	-	PT Global Furnika Mandiri
PT XL Planet	-	294.260.000	PT XL Planet
British School Jakarta	-	90.750.000	British School Jakarta
Lain-lain	-	110.000.000	Others
Sub jumlah	1.676.201.442	862.410.000	Sub total
Cadangan penurunan nilai piutang	(626.011.760)	(367.400.000)	Allowance for impairment
Jumlah	1.050.189.682	495.010.000	Total



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

b. Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

b. The aging analysis on trade receivables are as follows:

	2021	2020	
<u>Pihak ketiga:</u>			<u>Third parties:</u>
0 – 30 hari	761.954.460	404.260.000	0 – 30 days
31 – 60 hari	288.235.222	-	31 – 60 days
61 – 90 hari	-	-	61 – 90 days
* Lebih dari 90 hari	626.011.760	458.150.000	More than 90 days
Sub-jumlah	1.676.201.442	862.410.000	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(626.011.760)	(367.400.000)	Allowance for impairment
Jumlah	1.050.189.682	495.010.000	Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Mutation of allowance for impairment losses are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	367.400.000	-	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan (lihat Catatan 24)	258.611.760	367.400.000	Allowance for the year (see Note 24)
Jumlah	626.011.760	367.400.000	Total

Piutang usaha tidak dijaminkan atas pinjaman dan tidak terdapat jaminan yang diterima Entitas atas piutang tersebut.

Trade receivables are not pledged as collateral for loans and there are no guarantees which are received by the Entity on the trade receivables.

Entitas menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Entity apply the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of trade receivables as of December 31, 2021 and 2020, management believes that the allowance for impairment loss on trade receivables is enough to cover possible losses from uncollectible accounts.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG LAIN-LAIN**

**6. OTHER RECEIVABLES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Bunga pinjaman	2.013.565.442	1.594.046.210	Interest loan
Dr. Farm	960.201.711	222.210.700	Dr. Farm
PT Putra Oetama Teknologi	619.634.946	-	PT Putra Oetama Teknologi
Karyawan	336.652.880	102.145.399	Employee
PT Pilar Karya Perkasa	51.747.053	6.721.928.817	PT Pilar Karya Perkasa
Belly Ferdiansyah	-	2.035.682.687	Belly Ferdiansyah
Sub-jumlah	3.981.802.032	10.676.013.813	Sub-total
<u>Pihak berelasi (lihat Catatan 25)</u>			<u>Related parties (see Note 25)</u>
PT Mangkok Besar Cuan	607.612.654	432.481.098	PT Mangkok Besar Cuan
PT Kreatif Cemerlang			PT Kreatif Cemerlang
Nusantara	24.521.315	-	Nusantara
Sub-jumlah	632.133.969	432.481.098	Sub-total
Jumlah	4.613.936.001	11.108.494.911	Total

Piutang lain-lain tidak dijaminan atas pinjaman dan tidak terdapat jaminan yang diterima Entitas atas piutang tersebut.

*Other receivables are not pledged as collateral for loans and there are no guarantees which are received by the Entity on the receivables.*

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif bahwa piutang lain-lain mengalami penurunan nilai, oleh karena itu tidak ditentukan adanya penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

*Based on the review of other receivables as of December 31, 2021 and 2020, the Entity's management believe that there are no objective evidences of impairment, therefore no allowance for impairment loss on other receivables.*

Semua piutang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

*All other receivables are in Rupiah.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. UANG MUKA SUBKONTRAKTOR**

Akun ini merupakan uang muka yang dibayarkan kepada subkontraktor untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan dikompensasi dengan pembayaran termin kepada subkontraktor pada tahun 2020.

**7. ADVANCES TO SUBCONTRACTORS**

This account represents advance payments to subcontractors in relation to the accomplishment of projects. These advance payments will be compensated against the billing progress of each subcontractor in 2020.

	2021	2020	
PT Global Furnika Mandiri	1.584.000.000	-	PT Global Furnika Mandiri
Lain-lain	279.223.061	-	Others
Jumlah	<u>1.863.223.061</u>	<u>-</u>	Total

**8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

Akun ini terdiri dari:

**8. PREPAID EXPENSES**

This account consists of:

	2021	2020	
Deposit	68.550.000	35.550.000	Deposits
Jumlah	<u>68.550.000</u>	<u>35.550.000</u>	Total

**9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA**

Akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 31.817.337 pada tahun 2021.

**9. PREPAID TAXES**

This account is a Value Added Tax of Rp 31,817,337 in 2021.

**10. ASET HAK GUNA**

Akun ini merupakan sewa bangunan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**10. RIGHT OF USED ASSETS**

This account represent rent of buildings as of December 31, 2021 and 2020.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. ASET TETAP**

**11. FIXED ASSETS**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

		2021			
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya perolehan</u></b>					<b><u>Cost</u></b>
Kendaraan	233.898.000	390.747.728	-	624.645.728	<i>Vehicles</i>
Peralatan proyek	28.264.282	16.689.819	-	44.954.101	<i>Project equipments</i>
Peralatan kantor	476.864.498	154.097.723	-	630.962.221	<i>Office equipment</i>
Sub-jumlah	<u>739.026.780</u>	<u>561.535.270</u>	<u>-</u>	<u>1.300.562.050</u>	<i>Sub-total</i>
<b><u>Akumulasi penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated depreciation</u></b>
Kendaraan	51.111.958	41.376.620	-	92.488.578	<i>Vehicles</i>
Peralatan proyek	6.791.228	8.140.670	-	14.931.898	<i>Project equipments</i>
Peralatan kantor	53.023.859	131.543.166	-	184.567.025	<i>Office equipments</i>
Sub-jumlah	<u>110.927.045</u>	<u>181.060.456</u>	<u>-</u>	<u>291.987.501</u>	<i>Sub-total</i>
<b>Nilai Buku</b>	<u>628.099.735</u>			<u>1.008.574.549</u>	<b><i>Net Book Value</i></b>
2020					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya perolehan</u></b>					<b><u>Cost</u></b>
Kendaraan	59.533.000	174.365.000	-	233.898.000	<i>Vehicles</i>
Peralatan proyek	17.446.782	10.817.500	-	28.264.282	<i>Project equipments</i>
Peralatan kantor	155.370.624	321.493.875	-	476.864.499	<i>Office equipment</i>
Sub-jumlah	<u>232.350.406</u>	<u>506.676.375</u>	<u>-</u>	<u>739.026.781</u>	<i>Sub-total</i>
<b><u>Akumulasi penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated depreciation</u></b>
Kendaraan	35.946.396	15.165.563	-	51.111.959	<i>Vehicles</i>
Peralatan proyek	1.077.345	5.713.883	-	6.791.228	<i>Project equipments</i>
Peralatan kantor	15.781.507	37.242.352	-	53.023.859	<i>Office equipments</i>
Sub-jumlah	<u>52.805.248</u>	<u>58.121.798</u>	<u>-</u>	<u>110.927.046</u>	<i>Sub-total</i>
<b>Nilai Buku</b>	<u>179.545.158</u>			<u>628.099.735</u>	<b><i>Net Book Value</i></b>

Penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari akun "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2021 dan 2020 (lihat catatan 23).

*Depreciation of fixed assets is recorded as part of account "General and administrative expense" in the statements of comprehensive profit or loss in 2021 and 2020 (see Note 23).*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, diasuransikan bersama terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya (all risk) berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 584.357.500 dan Rp 155.675.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

*Fixed assets, except land rights, were covered by insurance against losses against fire or theft and other risks under blanket policies amounting to Rp 584,357,500 and Rp 155,675,000 as of December 31, 2021 and 2020, respectively. The Entity's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.*

Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 37.283.000.

*The acquisition costs of fixed assets which have been fully depreciated and still being used as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 37,283,000.*

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

*Based on the evaluation performed, management believes that there are no events or changes in the circumstances, which may indicate impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2021 and 2020.*

Aset tetap tertentu dijaminkan atas utang bank dari PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance (lihat Catatan 15).

*These fixed assets are pledged for bank loan from PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance (see Note 15).*

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

*Based on the evaluation performed, management believes that there are no events or changes in the circumstances, which may indicate impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2021 and 2020.*

**12. UTANG BANK**

**12. SHORT-TERM BANK LOAN**

Akun ini merupakan utang bank jangka pendek dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp 4.400.000.000 dan Rp 6.376.968.924 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

*This account represent to short-term bank loan from PT Bank Danamon Indoneisa amounting to Rp 4,400,000,000 and Rp 6,376,968,924 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*

Pada 31 Mei 2017, Entitas memperoleh fasilitas kredit yang terdiri dari:

*On May 31, 2017, the Entity obtained credit facilities which consist of:*

Fasilitas/ Facilities	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Bunga/ Interest	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
Kredit Rekening Koran/ Current Account Credit	Rp 2.000.000.000	11%	31 Mei 2018 / May 31, 2018
Kredit Berjangka/ Term Loan	Rp 2.900.000.000	11%	31 Mei 2018 / May 31, 2018



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada 2021, Entitas memperoleh persetujuan perubahan fasilitas kredit yang terdiri dari:

*In, 2021, the Entity obtained credit facilities which consist of:*

Fasilitas/ Facilities	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Bunga/ Interest	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
Kredit Rekening Koran / Current Account Credit	Rp 2.000.000.000	12,5%	23 Mei 2022/ May 23, 2022
Kredit Berjangka / Term Loan	Rp 4.400.000.000	12,5%	23 Mei 2022/ May 23, 2022

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis dari Danamon tidak diperkenankan untuk:

*The Entity without written approval from Danamon is not allowed to:*

- Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang disepakati.
- Melakukan perubahan usaha.

- Use credit facilities received other than the agreed objectives and requirements.
- Change in business.

Pinjaman ini dijamin dengan :

*The credit facilities are collateralized by:*

- Tanah yang terletak di Desa Jatipadang dengan SHM No. 5332 seluas 278 m<sup>2</sup> atas nama Richie Adrian Hartanto.
- Tanah yang terletak di Desa Sawah dengan SHM No. 1218 seluas 130 m<sup>2</sup> atas nama Rama Permana dan Andry Setiawan.

- Land which are located on Desa Jatipadang with SHM No. 5332 for 278 m<sup>2</sup> under the name of Richie Adrian Hartanto.
- Land which are located on Desa Sawah with SHM No. 1218 for 130 m<sup>2</sup> under the name of Rama Permana and Andry Setiawan.

**13. UTANG USAHA**

**13. TRADE PAYABLES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

- a. Rincian utang usaha – pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

- a. *Details of trade payables – third parties based on suppliers are as follows:*

	2021	2020	
<u>Pihak ketiga:</u>			<u>Third parties:</u>
Lilik Rudiyo	75.000.000	228.659.800	Lilik Rudiyo
PT Lucatama Karya			PT Lucatama Karya
Panelindo	67.324.500	103.750.000	Panelindo
Sumber Baru	58.915.000	-	Sumber Baru
Teguh Furniture	43.181.247	-	Teguh Furniture
Lain-lain (di bawah Rp 20 juta)	109.520.321	20.913.850	Others (Under Rp 20 million)
Jumlah	353.941.068	353.323.650	Total



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

b. Analisa umur utang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

b. The aging analysis on trade payables – third parties are as follows:

	2021	2020	
<u>Pihak ketiga:</u>			<u>Third parties:</u>
0 – 30 hari	353.941.068	353.323.650	0 – 30 days
Jumlah	<u>353.941.068</u>	<u>353.323.650</u>	Total

**14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

**14. ACCRUED EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2021	2020	
Karyawan	73.942.922	-	Employee
Jumlah	<u>73.942.922</u>	<u>-</u>	Total

**15. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK**

**15. NON BANK FINANCIAL INSTITUTION LOAN**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2021	2020	
PT Lunaria Annua Teknologi	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Lunaria Annua Teknologi
PT Mandiri Utama Finance	135.856.416	-	PT Mandiri Utama Finance
PT Mandiri Tunas Finance	60.559.142	88.419.981	PT Mandiri Tunas Finance
PT Gradana Teknoruci Indonesia	-	860.000.000	PT Gradana Teknoruci Indonesia
Jumlah	2.196.415.558	2.948.419.981	Total
Bagian jangka pendek	(2.090.714.313)	(2.887.860.839)	Short-term portion
Bagian jangka panjang	<u>105.701.245</u>	<u>60.559.142</u>	Long-term portion

**PT Lunaria Annua Teknologi**

**PT Lunaria Annua Teknologi**

Pada tanggal 29 Juli 2020, Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Lunaria Annua Teknologi dengan *plafond* sebesar Rp 2.000.000.000 untuk pembiayaan *invoicing*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21,9% per tahun dan akan jatuh tempo pada 29 Juli 2021.

On July 29, 2020 the Entity enters the agreement with PT Lunaria Annua Teknologi with a ceiling of Rp 2,000,000,000 for purchasing a vehicle. This loan subject to interest at 21,9% per year, financing facility on invoice and will mature on the July 29, 2020.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Lunaria Annua Teknologi dengan *plafond* sebesar Rp 2.000.000.000

On October 7, 2021, the Entity enters the agreement with PT Lunaria Annua Teknologi with a ceiling of Rp 2,000,000,000 for financing



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

untuk pembiayaan tagihan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21,9 % per tahun, yang akan jatuh tempo pada 7 Oktober 2022.

*facility on invoice. This loan subject to interest at 21,9% per year and will mature on the October 7, 2022.*

**PT Gradana Teknoruci Indonesia**

**PT Gradana Teknoruci Indonesia**

Pada tahun 2019 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 816.000.000 untuk pembiayaan *invoicing*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 4 Februari 2020.

*In 2019 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 816,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the February 4, 2020.*

Pada tahun 2019 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 675.500.000 untuk pembiayaan *invoicing*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 31 Januari 2020.

*In 2019 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 675,500,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the January 31, 2020.*

Pada tahun 2020 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 600.000.000 untuk pembiayaan *invoicing*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 2 Maret 2021.

*In 2020 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 600,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the March 2, 2021.*

Pada tahun 2020 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 260.000.000 untuk pembiayaan *invoicing*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 23 Februari 2021.

*In 2020 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 260,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the February 23, 2021.*

**PT Mandiri Tunas Finance**

**PT Mandiri Tunas Finance**

Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Mandiri Tunas Finance dengan *plafond* sebesar Rp 98.161.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19,6% per tahun dan akan jatuh tempo pada 3 Agustus 2023.

*The entity enters the agreement with PT Mandiri Tunas Finance with a ceiling of Rp 98,161,000. This loan subject to interest at 19,6% per year and will mature on the August 3, 2023.*

**PT Mandiri Utama Finance**

**PT Mandiri Utama Finance**

Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Mandiri Utama Finance dengan *plafond* sebesar Rp 148.500.000 untuk pembelian kendaraan.

*The entity enters the agreement with PT Mandiri Utama Finance with a ceiling of Rp 148,500,000 for purchasing a vehicle. This loan subject to*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 30,91% per tahun, dijamin dengan kendaraan yang terkait dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2023.

*interest at 30.91% per year, guaranteed by the related vehicle and will mature on the November 21, 2023.*

**16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA**

Akun ini merupakan liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja sebesar Rp 443.706.000 dan Rp 335.549.000 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Rinaldi dan Zulhamdi, aktuaris independen, Entitas mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

**Risiko Tingkat Bunga**

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

**Risiko Gaji**

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

**16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS**

*This account represents estimated liabilities for employee benefits amounting to Rp 443,706,000 and Rp 335,549,000 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*

*Based on actuarial valuation performed by KKA Rinaldi dan Zulhamdi, an independent actuary, the Entity recorded a defined benefit on severance pay, gratuity and compensation benefits to employees which are presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" on the statements of financial position.*

*The defined benefit pension plan typically expose the Entity to actuarial risks such as, interest rate risk and salary risk.*

**Interest Risk**

*A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.*

**Salary Risk**

*The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2021	2020	
Usia pensiun	55 tahun/years	55 tahun/years	Retirement age
Tingkat bunga diskonto	7,5%	7,5 %	Interest discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,0%	5,0 %	Salary increment rate
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Method

**Imbalan Pascakerja**

**Post-Employment Benefits**

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

The mutation of estimated liabilities for employee benefits as of December 31, 2021 and 2020, are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	335.549.000	217.239.000	Beginning balance
Penambahan (pengurangan) selama tahun berjalan (lihat Catatan 23)	18.525.000	118.310.000	Addition (deduction) during the current year (see Note 23)
Pembayaran manfaat	-	-	Payment of benefits
Penghasilan komprehensif lain	89.632.000	-	Other comprehensive income
Saldo akhir tahun	443.706.000	335.549.000	Ending balance

Rincian pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Details of other comprehensive income are as follow:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	-	-	Beginning balance
Kerugian (keuntungan) tahun berjalan	89.632.000	-	Loss (gain) during current year
Saldo akhir tahun	89.632.000	-	Ending balance

Tabel di bawah ini menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar sebesar 100 basis poin, dengan *variable* lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja karyawan masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates of 100 basis point, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense as of December 31, 2021 and 2020:



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021		2020		
	Liabilitas diestimasi atas imbalan/ <i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	Beban jasa kini dan beban bunga/ <i>Current service cost and interest cost</i>	Liabilitas diestimasi atas imbalan/ <i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	Beban jasa kini dan beban bunga/ <i>Current service cost and interest cost</i>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(47.548.000)	(47.548.000)	(34.356.000)	(34.356.000)	Increase in interest rate in 100 basis point
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	56.065.000	56.065.000	40.515.000	40.515.000	Decrease in interest rate in 100 basis point
Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).	The management of the Entity believes that the allowance as of December 31, 2021 and 2020 is adequate to meet the requirements of Labor Law No. 13/2003 and PSAK No. 24 (Improvement 2018).				

**17. MODAL SAHAM**

**17. CAPITAL STOCK**

Rincian pemegang saham dan jumlah kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of the Entity's stockholders and respective stockholdings as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ <i>Par Value Rp 1,000,000 per Share</i>			Stockholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Share Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership (%)</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Richie Adrian Hartanto S	1.420	71%	1.420.000.000	Richie Adrian Hartanto S
Rama Permana	580	29%	580.000.000	Rama Permana
Jumlah	2.000	100%	2.000.000.000	Total



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA**

**18. OTHER EQUITY COMPONENT**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Saldo awal	-	-	<i>Beginning balance</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(89.632.000)	-	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Pajak penghasilan terkait	19.719.040	-	<i>Related income tax</i>
Saldo akhir tahun	(69.912.960)	-	<i>Ending balance</i>

**19. PENDAPATAN**

**19. REVENUE**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Jasa konstruksi	7.589.586.869	4.671.410.663	<i>Construction services</i>
Jasa interior	2.036.817.606	3.122.700.000	<i>Interior services</i>
Jumlah	9.626.404.475	7.794.110.663	<i>Total</i>

**20. BEBAN POKOK PENJUALAN**

**20. COSTS OF GOODS SOLD**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Bahan baku	1.444.206.056	1.169.116.599	<i>Raw materials</i>
Tenaga kerja langsung	577.682.422	451.060.699	<i>Direct labor</i>
<i>Overhead</i>	2.887.921.343	2.727.938.732	<i>Overhead</i>
Beban Pokok Penjualan	4.909.809.821	4.348.116.030	<i>Costs of Goods Sold</i>

**21. PENDAPATAN LAIN-LAIN**

**21. OTHER INCOME**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Pendapatan bunga pinjaman	419.519.232	946.100.466	<i>Interest income from loans</i>
Pendapatan bunga bank	2.159.321	2.969.591	<i>Interest income from bank</i>
Jumlah	421.678.553	949.070.057	<i>Total</i>



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. BEBAN PENJUALAN**

**22. SELLING EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Pemasaran dan promosi	206.063.483	307.173.308	<i>Marketing and promotion</i>
Jumlah	<u>206.063.483</u>	<u>307.173.308</u>	<i>Total</i>

**23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

**23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Gaji dan honorarium Kantor	1.807.527.609	1.534.939.301	<i>Salaries Office</i>
Penyusutan (lihat Catatan 11)	285.431.886	307.486.647	<i>Depreciation (see Note 11)</i>
Fasilitas transportasi dan mobilitas	181.060.455	58.121.798	<i>Transport and mobility facilities</i>
Imbalan kerja (lihat Catatan 16)	124.573.329	100.760.878	<i>Employee benefits (see Note 16)</i>
Perjalanan dinas	18.525.000	118.310.000	<i>Travelling</i>
Jumlah	<u>15.635.650</u>	<u>13.165.244</u>	<i>Total</i>
	<u>2.432.753.929</u>	<u>2.132.783.868</u>	

**24. BEBAN LAIN-LAIN**

**24. OTHER EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020	
Biaya bunga bank	787.884.794	755.154.554	<i>Bank interest expense</i>
Biaya administrasi bank dan lembaga keuangan	436.017.578	164.948.255	<i>Bank administration and financial institution expense</i>
Beban penurunan nilai piutang (lihat Catatan 5)	258.611.760	367.400.000	<i>Receivable impairment Expenses (see Note 5)</i>
Jumlah	<u>1.482.514.132</u>	<u>1.287.502.809</u>	<i>Total</i>



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-  
 PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Entitas melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga wajar dan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Sifat Hubungan</u>	<u>Pihak Berelasi/Related Parties</u>
Pemegang saham dan : manajemennya sama dengan Entitas	PT Mangkok Besar Cuan PT Kreatif Cemerlang Nusantara

Transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Entitas melakukan transaksi keuangan dengan pihak berelasi. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut sebesar Rp 632.133.969 dan Rp 432.481.098 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 6).

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 5,47% and 3,24% dari jumlah aset.

**25. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH  
 RELATED PARTIES**

*The Entity, in the ordinary course of business, had trade and financial transactions with related parties. The transactions with related parties were conducted on an arm's length basis similar to third parties. The nature of the Entity's relationships with related parties are as follows:*

<u>Nature of Relationships</u>
<i>Related parties which have the same Stockholders and management as the Entity</i>

*Significant transactions and balances with related parties are as follows:*

*The Entity conducted financial transaction with related parties. The related outstanding amounting to Rp 632,133,969 and Rp 432,481,098 as of December 31, 2021 and 2020 are presented as "Other Receivables – Related Party" in the statement of financial position, respectively (see Note 6).*

*Other receivables to related party as of December 31, 2021 and 2020 represented 5.47% and 3.24% of total asset, respectively.*

**26. PERPAJAKAN**

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 31.817.337 pada tanggal 31 Desember 2021.

**26. TAXATION**

a. Prepaid Taxes

*This account represents Value Added Tax amounting to Rp 31,817,337 as of December 31, 2021.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
PPh Pasal 4 (2)	141.102.013	-
PPh Pasal 21	9.098.200	3.810.900
PPh Pasal 25	-	168.900
PPh Pasal 29	73.761.732	143.005.025
Pajak Pertambahan Nilai	352.755.032	33.772.633
Denda pajak	-	195.100.485
Jumlah	<u>576.716.977</u>	<u>375.857.943</u>

b. Taxes Payable

This account consists of:

Income tax article 4 (2)  
 Income tax article 21  
 Income tax article 25  
 Income tax article 29  
 Value Added Tax  
 Tax penalties  
 Total

Pada tahun 2020 Entitas memiliki denda pajak sebesar Rp 195.100.485 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar lunas ditahun 2021 sebagai berikut:

In 2020 the Entity has a tax penalty amounted Rp 195,100,485 for Tax Assessment Letter of Undepayment on Value Added Tax (SKPKB) that have been paid in full in 2021 as follows:

Nomor/ Number	Tanggal/ Date	Masa pajak/ Tax periode	Jumlah/ Amount
00059/207/16/416/17	Oktober 2017/ October 2017	Januari – Desember 2016/ January – December 2016	89.406.903
00060/207/16/416/17	Oktober 2017/ October 2017	Januari – Desember 2016/ January – December 2016	105.693.582

c. Penghasilan (Beban) Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Final	(287.712.294)	(190.020.785)
Non Final	(115.004.784)	(156.509.068)
Tangguhan	4.075.500	26.028.200
Jumlah	<u>(398.641.578)</u>	<u>(320.501.653)</u>

c. Tax Income (Expenses)

This account consists of:

Final  
 Non Final  
 Deferred  
 Total

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba (rugi) kena pajak untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Current Tax**

The reconciliations between income (loss) before provision for tax expense, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (loss) for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively, are as follows:



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
Laba sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.016.941.663	667.604.705	<i>Income before provision for tax expense according to the statements of profit and loss and other comprehensive income</i>
Rugi (laba) sebelum pajak yang dikenakan pajak final	(339.103.912)	(242.016.106)	<i>Loss (income) before tax subject to final tax</i>
Laba sebelum pajak yang tidak dikenakan pajak final	677.837.751	425.588.599	<i>Income before tax that is not subject to final tax</i>
Beda waktu:			<i>Temporary differences:</i>
Imbalan kerja	18.525.000	118.310.000	<i>Employee benefits</i>
Taksiran laba fiskal kena pajak	696.362.751	543.898.599	<i>Estimated taxable income fiscal</i>
	2021	2020	
Beban pajak kini – non final	115.004.784	156.509.068	<i>Current tax expense – non final</i>
Dikurangi kredit pajak :			<i>Less tax credit :</i>
PPh Pasal 23	40.736.352	10.317.444	<i>Income tax article 23</i>
PPh Pasal 25	506.700	3.186.600	<i>Income tax article 25</i>
Kurang bayar pajak	73.761.732	143.005.024	<i>Under payment income tax</i>

**Pajak Tangguhan**

**Deferred Tax**

Perhitungan taksiran beban pajak tangguhan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*The computation of deferred tax expense – net for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

	2021	2020	
<b>Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan</b>			<b>Deferred Tax Income (Expenses)</b>
Imbalan kerja	4.075.500	26.028.200	<i>Employee benefits</i>
Penghasilan pajak tangguhan	4.075.500	26.028.200	<i>Deferred tax income</i>

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal dan kumulatif rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*The tax effects of significant temporary differences between financial and tax reporting and cumulative fiscal loss as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>			<b>Deferred Tax Assets</b>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	97.615.320	73.820.780	Estimated liabilities for employee benefits
Aset pajak tangguhan – bersih	97.615.320	73.820.780	Deferred tax assets – net

Berdasarkan evaluasi, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan dapat terealisasi.

Based on evaluation, the management of the Entity believes that the balance of deferred tax assets can be realized.

**27. PERIKATAN**

**27. COMMITMENTS**

a. Belly Ferdiansyah

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0001/PKMK/2019 tanggal 24 Juli 2019 kepada Belly Ferdiansyah dengan *plafond* sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020 (lihat Catatan 6).

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/ADD-1/0001/PKMK/2019 tanggal 9 Januari 2020 kepada Belly Ferdiansyah dengan *plafond* sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021 (lihat Catatan 6).

b. Tommy Fredi Hasibuan

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0005/PKMK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 kepada Tommy Fredi Hasibuan dengan *plafond* sebesar Rp 350.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2020 (lihat Catatan 6).

a. Belly Ferdiansyah

The Entity enters the agreement No. HDK/0001/PKMK/2019 dated July 24, 2019 with Belly Ferdiansyah with a *plafond* of Rp 3,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 25, 2020 (see Note 6).

The Entity enters the agreement No. HDK/ADD-1/0001/PKMK/2019 dated January 9, 2020 with Belly Ferdiansyah with a *ceiling* of Rp 3,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 25, 2021 (see Note 6).

b. Tommy Fredi Hasibuan

The Entity enters the agreement No. HDK/0005/PKMK/2019 dated October 8, 2019 with Tommy Fredi Hasibuan with a *plafond* of Rp 350,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the April 9, 2020 (see Note 6).



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

c. PT Mangkok Besar Cuan

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0002/PKMK/2020 tanggal 9 Oktober 2020 kepada PT Mangkok Besar Cuan dengan *plafond* sebesar Rp 450.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2021 (lihat Catatan 6).

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/ADD1/0002/PKMK/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada PT Mangkok Besar Cuan dengan *plafond* sebesar Rp 700.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2022 (lihat Catatan 6).

d. PT Pilar Karya Perkasa

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0006/PKMK/2020 tanggal 25 Juli 2020 kepada PT Pilar Karya Perkasa dengan *plafond* sebesar Rp 7.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2021 (lihat Catatan 6).

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/ADD1/0006/PKMK/2020 tanggal 9 Juli 2021 kepada PT Pilar Karya Perkasa dengan *plafond* sebesar Rp 7.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2022 (lihat Catatan 6).

e. Dr. Farm

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0003/PKMK/2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada Dr. Farm dengan *plafond* sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2021 (lihat Catatan 6).

c. PT Mangkok Besar Cuan

*The Entity enters the agreement No. HDK/0002/PKMK/2020 dated October 9, 2020 with PT Mangkok Besar Cuan with a plafond of Rp 450,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 12, 2021 (see Note 6).*

*The Entity enters the agreement No. HDK/ADD1/0002/PKMK/2020 dated December 29, 2020 with PT Mangkok Besar Cuan with a plafond of Rp 700,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 12, 2022 (see Note 6).*

d. PT Pilar Karya Perkasa

*The Entity enters the agreement No. HDK/0006/PKMK/2020 dated July 25, 2020 with PT Pilar Karya Perkasa with a plafond of Rp 7,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the July 25, 2021 (see Note 6).*

*The Entity enters the agreement No. HDK/ADD1/0006/PKMK/2020 dated July 9, 2021 with PT Pilar Karya Perkasa with a plafond of Rp 7,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the July 25, 2022 (see Note 6).*

e. Dr. Farm

*The Entity enters the agreement No. HDK/0003/PKMK/2020 dated December 7, 2020 with Dr. Farm with a plafond of Rp 250,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 8, 2021 (see Note 6).*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/ADD1/0003/PKMK/2020 tanggal 5 Januari 2021 kepada Dr. Farm dengan *plafond* sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2022 (lihat Catatan 6).
- The Entity enters the agreement No. HDK/ADD1/0003/PKMK/2020 dated January 5, 2021 with Dr. Farm with a plafond of Rp 1,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 8, 2022 (see Note 6).*
- f. PT Matrixindo Multi Kreasi
- f. PT Matrixindo Multi Kreasi*
- Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0004/PKMK/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada PT Matrixindo Multi Kreasi dengan *plafond* sebesar Rp 6.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2020 (lihat Catatan 6).
- The entity enters the agreement No. HDK/0004/PKMK/2019 date July 10, 2019 with PT Matrixindo Multi Kreasi with a plafond of Rp 6,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the April 10, 2020 (see Note 6).*
- g. PT Putra Oetama Teknologi
- g. PT Putra Oetama Teknologi*
- Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0003/PKMK/2021 tanggal 5 Agustus 2021 kepada PT Putra Oetama Teknologi dengan *plafond* sebesar Rp 700.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2022 (lihat Catatan 6).
- The Entity enters the agreement No. HDK/0003/PKMK/2021 dated August 5, 2021 with PT Putra Oetama Teknologi with a plafond of Rp 700,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the August 8, 2022 (see Note 6).*
- h. PT Kreatif Cemerlang Nusantara
- h. PT Kreatif Cemerlang Nusantara*
- Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0008/PKMK/2021 tanggal 5 November 2021 kepada PT Kreatif Cemerlang Nusantara dengan *plafond* sebesar Rp 50.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2022 (lihat Catatan 6).
- The Entity enters the agreement No. HDK/0008/PKMK/2021 dated November 5, 2021 with PT Kreatif Cemerlang Nusantara with a plafond of Rp 50,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the February 8, 2022 (see Note 6).*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN**  
**MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND**  
**FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

a. *Financial Risk Management Factors and Policies*

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas menghadapi risiko keuangan yaitu: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

*In their operating, investing and financing activities, the Entity are exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:*

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas.
- Risiko likuiditas: Entitas menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Entitas tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

- *Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity will incur loss.*
- *Liquidity risk: the Entity defined liquidity risk from the collectibility of the trade receivable as mentioned above, which may cause difficulty in meeting the obligations of the Entity relating to financial liabilities.*
- *Market risk: currently there are no market risk other than interest rate risk and foreign currency exchange rate risk as the Entity do not invest in any financial instruments in their normal activities.*

**Risiko Kredit**

***Credit Risks***

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang pihak berelasi. Entitas mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang pihak berelasi dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan dan pihak berelasi.

*Credit risk represents the risk of financial loss of the Entity if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from trade receivables and related party. The Entity manage and control credit risk from trade receivables and due from related party by monitoring the default limit period on each customer and related party.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021				
	Telah jatuh tempo/ <i>Past due</i>		Penurunan nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>Over 1 year</i>			
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u><i>Financial assets measured at amortized cost</i></u>
Bank	2.721.976.209	-	-	2.721.976.209	<i>Cash in banks</i>
Piutang usaha	1.676.201.442	-	(626.011.760)	1.050.189.682	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	4.613.936.001	-	-	4.613.936.001	<i>Other receivables</i>
Jumlah	9.012.113.652	-	(626.011.760)	8.386.101.892	<i>Total</i>
	2020				
	Telah jatuh tempo/ <i>Past due</i>		Penurunan nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>Over 1 year</i>			
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u><i>Financial assets measured at amortized cost</i></u>
Bank	919.263.315	-	-	919.263.315	<i>Cash in banks</i>
Piutang usaha	862.410.000	-	(367.400.000)	495.010.000	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	11.108.494.911	-	-	11.108.494.911	<i>Other receivables</i>
Jumlah	12.890.168.226	-	(367.400.000)	12.522.768.226	<i>Total</i>

**Risiko Likuiditas**

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

**Liquidity Risks**

*Through their operations and existing funding sources, the Entity can meet all their financial obligations as they mature, because the Entity have the financial assets which are liquid and available to meet liquidity needs.*

*In managing the liquidity risk, the observe strict control on the forecast and continuous realization of actual cash flows from both collectibility of receivables as well as the fulfillment of obligations and due dates.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Tabel berikut menyajikan jumlah liabilitas keuangan pada 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan jatuh temponya:

The following table presents the amount of financial liabilities on December 31, 2021 and 2020, based on their maturity:

	2021			
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 years</i>	Jumlah/Total	
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial assets measured at amortized cost</u>
Utang bank	4.400.000.000	-	4.400.000.000	Bank loan
Utang usaha	353.941.068	-	353.941.068	Trade payables
Beban masih harus dibayar	75.201.000	-	75.201.000	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	2.090.714.313	105.701.245	2.196.415.558	Financial institution loan – non bank
Jumlah	6.919.856.381	105.701.245	7.025.557.626	Total
	2020			
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 years</i>	Jumlah/Total	
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial assets measured at amortized cost</u>
Utang bank	6.376.968.924	-	6.376.968.924	Bank loan
Utang usaha	353.323.650	-	353.323.650	Trade payables
Utang lembaga keuangan non bank	2.887.860.839	60.559.142	2.948.419.981	Financial institution loan – non bank
Jumlah	9.618.153.413	60.559.142	9.678.712.555	Total

**Risiko Suku Bunga**

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Entitas yang dipengaruhi bunga adalah:

**Interest Rate Risks**

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

On the statement of financial position date, the Entity's profile of financial instruments that affected by the interest, as follows:



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
<b>Instrumen dengan bunga tetap</b>			<b>Flat interest instrument</b>
Aset keuangan	-	-	Financial assets
Liabilitas keuangan	2.196.415.558	2.948.419.981	Financial liabilities
Jumlah liabilitas – bersih	<u>(2.196.415.558)</u>	<u>(2.948.419.981)</u>	Total liabilities – net
<b>Instrumen dengan bunga mengambang</b>			<b>Floating interest instruments</b>
Aset keuangan	2.721.976.209	919.263.315	Financial assets
Liabilitas keuangan	(4.400.000.000)	(6.376.968.924)	Financial liabilities
Jumlah liabilitas – bersih	<u>(1.678.023.791)</u>	<u>(5.457.705.609)</u>	Total liabilities – net

Entitas tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga, terutama menyangkut deposito kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Sehingga, Entitas tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

*The Entity is not significantly exposed to interest rate risk, especially with regard to deposits to banks which use market interest rate. Thus, the Entity does not have a policy or a particular arrangement to interest rate risk. There is no interest rate hedging activities as of December 31, 2021 and 2020.*

**Analisis Sensitivitas**

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba Entitas selama tahun berjalan:

**Sensitivity Analysis**

*The following table summarizes the sensitivity of interest rate changes that may occur, with other variables held constant, the profit of the Entity during the year:*

	2021	2020	
<b>Tingkat suku bunga BI</b>			<b>Interest rate BI</b>
Kenaikan (penurunan) tingkat suku bunga dalam basis poin	25	(125)	Increase (decrease) in interest rates in basis points
Efek terhadap laba tahun berjalan	3.272.146	53.212.630	Effects on income for the year







**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

*Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry interest rate at market.*

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

*The fair value for the above financial instruments was determined by discounting the estimated cashflows using discount rates for financial instruments with similar term and maturity.*

**29. PENGELOLAAN MODAL**

**29. CAPITAL MANAGEMENT**

Tujuan pengelolaan modal Entitas adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

*The objectives of capital management are to secure the Entity's ability to continue its business in order to deliver results for stockholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.*

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan, Entitas memaksimalkan penerimaan kas dari penjualan

*In order to maintain or adjust the capital structure, the Entity maximizes the cash proceeds from the sale.*

Seluruh struktur permodalan Entitas merupakan modal sendiri. Entitas tidak memiliki liabilitas untuk memelihara rasio keuangan dan struktur permodalan tertentu.

*The Entity has its own capital structure, therefore the Entity doesn't have obligation to maintain a certain financial ratio and certain capital structure.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Struktur permodalan Entitas adalah sebagai berikut:

The Entity's capital structure are as follows:

	2021		2020		
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	
Liabilitas jangka pendek	7.495.315.280	64,92%	9.994.011.356	74,90%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	549.407.245	4,76%	396.108.142	2,97%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	8.044.722.525	69,68%	10.390.119.498	77,87%	Total liabilities
Ekuitas	3.501.133.603	30,32%	2.952.746.478	22,13%	Equity
Jumlah	11.545.856.128	100%	13.342.865.976	100%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas	2,30		3,52		Debt to equity ratio

**30. INFORMASI PENTING LAINNYA**

**30. OTHER IMPORTANT INFORMATION**

a) Undang-undang No. 2 Tahun 2020

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

1. Penurunan tarif menjadi 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021;
2. Penurunan tarif menjadi 20% yang berlaku pada Tahun Pajak 2022;
3. Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% memperoleh tarif 3% lebih rendah dari poin 1 dan 2 di atas (dan apabila memenuhi syarat tertentu).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, rencana tarif pajak penghasilan badan sebesar 20% untuk tahun pajak 2022 dibatalkan. Tarif pajak masih dipertahankan pada 22%.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E, maka wajib badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai

a) Law No. 2 Year 2020

Based on Law No. 2 Year 2020 there are some adjustments on income tax rates of the domestic corporate taxpayer and permanent establishment, as follows:

1. Decrease the tax rate to 22% effective for the Fiscal Years 2020 and 2021;
2. Decrease the tax rate to 20% effective for the Fiscal Year 2022;
3. Domestic corporate taxpayer in the form of publicly-listed entity with total number of shares of at least 40% traded at the Indonesian Stock Exchange which obtain 3% tax rate lower than in points 1 and 2 above (and when certain conditions are met).

Based on Law Number 7 Year 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations, the planned corporate income tax rate of 20% for the fiscal year 2022 had been cancelled. The tax rate is still maintained at 22%.

Based on Law No. 36 of 2008 Article 31E, it is mandated for a domestic entity that has a gross turnover of up to Rp 50,000,000,000 to



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

dengan Rp 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif PPh Badan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Maka pengaruh Undang-undang No. 2 Tahun 2020 untuk entitas yang menggunakan fasilitas maka tarif pajaknya akan mengalami penurunan menjadi 11% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021.

be entitled with a facility in the form of a 50% reduction in corporate income tax rates imposed on taxable income from the gross turnover of up to Rp 4,800,000,000. As a result, Law No. 2 of 2020 for entities that use the facility, the tax rate will decrease to 11% which is applicable for the fiscal years 2020 and 2021.

b) Pemberlakuan Omnibus Law

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" yang disebut dengan "Omnibus Law" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. *Omnibus Law* bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing kedalam negeri dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong iklim investasi nasional di Indonesia.

b) Enactment of Omnibus Law

On November 2, 2020, the Law No. 11 Year 2020 regarding "Jobs Creation", commonly referred to as the "Omnibus Law" was signed by the President of the Republic of Indonesia. The Omnibus Law aims create jobs and raise foreign and domestic investments by improving the ease of doing business and boost the national investment climate in Indonesia.

*Omnibus Law* mengatur kebijakan strategis yang meliputi:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan, serta untuk pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM");
4. Kemudahan berusaha;
5. Dukungan riset dan inovasi;
6. Pengadaan tanah;
7. Kawasan ekonomi;
8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. Penekaan sanksi.

The Omnibus Law regulates strategic policies which include:

1. Growth of investment ecosystem and business activities;
2. Employment and Labor;
3. Convenience, protection and empowerment of cooperatives and Micro, Small and Medium-sized Enterprises ("MSMEs");
4. Ease of doing business;
5. Support for research and innovation;
6. Land procurement;
7. Economic zones;
8. Central Government investment and national strategic projects;
9. Implementation of government administration; and
10. Imposition of sanctions.

*Omnibus Law* mengubah sejumlah undang-undang yang ada, antara lain UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dan UU No. 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional ("UU Jaminan Sosial").

The Omnibus Law amends a number of existing laws, including Law No. 13 of 2003 on Labor ("Labor Law") and Law No. 40 of 2004 on National Social Security System ("Social Security Law"), amongst others.



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Perubahan penting dalam undang-undang Ketenagakerjaan meliputi: masa kerja tertentu, *outsourcing*, lembur, upah minimum, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain.

*Omnibus Law* memperkenalkan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan atau jaminan pengangguran. Program yang baru diperkenalkan ini akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karyawan yang diberhentikan berhak atas manfaat dari program jaminan sosial pengangguran dalam bentuk uang tunai, akses ke informasi di pasar kerja dan pelatihan kerja. Pelaksanaan program jaminan pengangguran akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tiga dari undang-undang utama berkaitan dengan perpajakan yang dipengaruhi oleh *Omnibus Law* adalah:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan/KUP;
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beberapa perubahan penting pada undang-undang ini termasuk pelonggaran sanksi bagi wajib pajak, pembebasan pajak jenis tertentu (termasuk beberapa dividen dan pendapatan luar negeri), pengenalan konsep perpajakan teritorial, *tax allowance* dan juga beberapa perubahan dalam aturan PPN termasuk relaksasi pengkreditan PPN masukan yang menawarkan hasil yang lebih adil dan mendorong penguatan perekonomian.

Sampai dengan tanggal laporan audit ini, Entitas masih mengevaluasi dampak dari *Omnibus Law* tersebut. Dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan jika diketahui dan dapat diperkirakan.

*The essential changes on Labor law include: definite period of employment, outsourcing, overtime, minimum wage, termination of employment, amongst others.*

*The Omnibus Law introduces a new social security program, i.e., jaminan kehilangan pekerjaan or unemployment security. This newly introduced program will be administered by the Manpower Social Security Organizing Agency [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan)]. Terminated employees are entitled to benefits from the unemployment social security program in the form of cash, access to information on the job market and job training. The implementation of the unemployment security program will be further regulated under a government regulation.*

*Three of the major laws relating to taxation are impacted by the Omnibus Law:*

1. *The General Tax Procedures (Ketentuan Umum Perpajakan/KUP) Law;*
2. *The Income Tax Law (ITL); and*
3. *The Value Added Tax (VAT) Law.*

*Some of the important changes to these laws include relaxation of sanctions on taxpayers, exempting certain types of income from tax (including some dividends and offshore income), introduction of a limited territorial, tax allowance and also several changes in the VAT rules including relaxation of crediting VAT-in that offer a more fair and reasonable outcome and encourage to strengthen the economy.*

*As of the date of this audit report, the Entity are still currently evaluating the impact of the Omnibus Law. Such effects will be reported in the financial statements when they known and can be estimated.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

c) Pandemi Covid-19

Operasi Entitas dapat terdampak secara merugikan oleh wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Dampak merugikan dari *Covid-19* terhadap perekonomian global dan Indonesia meliputi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan kurs tukar terhadap mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari wabah *Covid-19* terhadap Indonesia serta Entitas belum dapat dijelaskan untuk saat ini. Peningkatan jumlah infeksi *Covid-19* atau wabah yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada Indonesia serta Entitas. Namun, dampak masa depan juga akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, telah terjadi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia ("IHSG"), *Indonesian Composite Index* ("ICBI"), kurs tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak dari menurunnya daya beli dan investasi yang berkontribusi oleh dampak *Covid-19*. Namun, dampak spesifik terhadap bisnis, pendapatan dan nilai terpulihkan dari aset dan liabilitas Entitas belum memungkinkan untuk ditentukan pada tahap ini. Dampak-dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan saat dampak tersebut dapat diketahui dan diestimasi.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (PP No. 35 Tahun 2021)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT"), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan untuk

c) Covid-19 Pandemic

The Entity's operations may be adversely impacted by the outbreak of *Corona Virus Disease ("Covid-19")*. The adverse effects of *Covid-19* to the global and Indonesia economy includes negative effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The future effects of the outbreak of *Covid-19* to Indonesia and the Entity are unclear at this time. A significant rise in the number of *Covid-19* infections or prolongation of the outbreak could have severe affect to Indonesia and the Entity. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia in response to the pandemic.

As of the date of these financial statements, there has been a decline in the Indonesia Stock Exchange Bond Index ("IHSG"), *Indonesia Composite Bond Index* ("ICBI") and Rupiah foreign currency exchange rates and the drop in Indonesia's economic growth which has resulted on the decline of the purchasing power and investment which were contributed by the impact of *Covid-19*. However, specific impact to the Entity's business, earnings, recoverability of assets and liabilities are not possible to be determined as this stage. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

d) Republic of Indonesia Government Regulation No. 35 of 2021

On February 2, 2021, Government Regulation No. 35 of 2021 concerning "Work Agreement for Specific Time ("PKWT"), Transfer, Working Time and Time off, and Termination of Employment" had been signed by the President of the Republic of Indonesia. This regulation was issued to implement the



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

*provisions of Article 81 and Article 185 letter b of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.*

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

*This Government Regulation contains, amongst others:*

- 1) PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu;
  - 2) Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT;
  - 3) Uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
  - 4) Perlindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya;
  - 5) Waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
  - 6) Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;
  - 7) Batasan perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang;
  - 8) Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja;
  - 9) Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- 1) *PKWT based on time period or completion of a certain job;*
  - 2) *Type and nature or work activities, time period, and deadline of extension for PKWT;*
  - 3) *Compensation for PKWT Workers/Laborers;*
  - 4) *Protection of Workers/Laborers and business license on outsourcing activities;*
  - 5) *Working time in a certain business sector or occupation;*
  - 6) *Overtime and overtime pay;*
  - 7) *Certain company restrictions that can implement long breaks;*
  - 8) *Procedures for Termination of Employment;*
  - 9) *Severance pay, reward payment and compensation payment.*
- e) *Law Number 7 Year 2021 Regarding Harmonization of Tax Regulations*

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", atau disebut dengan "UU HPP" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Beberapa ketentuan penting pada UU HPP, antara lain sebagai berikut:

*On October 29, 2021, the Law No. 7 Year 2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation" or referred to as "UU HPP" was signed by the President of the Republic of Indonesia. UU HPP consists of nine chapters that have six regulatory scopes, namely General Provisions and Tax Procedures (KUP), Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Voluntary Disclosure Program (PPS), Carbon Tax, and Excise. Several important provisions in the HPP Law, among others, are as follows:*

1. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

1. *Application of the Identification Number/ID Number (NIK) as an individual Taxpayer Identification Number (NPWP).*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- 
- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pengaturan mengenai besaran sanksi dan pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak.</li><li>3. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan <i>ultimum remedium</i>.</li><li>4. Pengaturan terkait pajak internasional.</li><li>5. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.</li><li>6. Batas peredaran bruto tertentu tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000.</li><li>7. Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.</li><li>8. Pemberlakuan tarif PPh Badan dan Badan Usaha Tetap menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.</li><li>9. Penghapusan barang kebutuhan pokok dan beberapa jasa seperti jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (<i>negative list</i>) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.</li><li>10. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.</li><li>11. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.</li><li>12. Program pengungkapan sukarela yang akan dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.</li><li>13. Pemberlakuan pajak karbon dengan implementasi 1 April 2022.</li><li>14. Perubahan ketentuan cukai.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Regulation regarding the amount of sanctions and the imposition of sanctions for Taxpayers.</li><li>3. Enforcement of tax criminal law by prioritizing <i>ultimum remedium</i>.</li><li>4. Arrangement of international tax.</li><li>5. Giving in kind and/or enjoyment to employees can be deducted by the employer and constitutes income for the employee.</li><li>6. Certain gross turnover limits are not taxable for individual entrepreneurs on the share of gross turnover up to Rp 500,000,000.</li><li>7. Changes in layers and rates of taxable income for individual taxpayer.</li><li>8. The application of Corporate Income Tax rate for corporate taxpayer and permanent establishment to 22% starting from the 2022 Fiscal Year.</li><li>9. Elimination of goods and services of basic needs and some services such as education services and health services from goods and services that are not subject to VAT (<i>negative list</i>) and transfer them to goods and services that are exempt from the imposition of VAT.</li><li>10. VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025.</li><li>11. Ease and simplicity of VAT with final rates for certain taxable goods or services.</li><li>12. Voluntary disclosure program that will start on January 1, 2022 up to June 30, 2022.</li><li>13. Enactment of carbon tax with the implementation of April 1, 2022.</li><li>14. Changes in excise regulations.</li></ol> |
|--|--|



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

UU HPP mengamendern regulasi yang telah ada, yaitu:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang Pajak penghasilan (UU PPh);
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Cukai (UU Cukai);
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

Atas masing-masing ruang lingkup pengaturan memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. ketentuan terkait PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, ketentuan mengenai PPN dan pajak karbon mulai 1 April 2022, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, sedangkan pengaturan mengenai KUP dan perubahan mengenai ketentuan cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Sampai dengan tanggal laporan audit ini, Entitas masih mengevaluasi dampak dari PP No. 35 Tahun 2021 tersebut. Dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan jika diketahui dan dapat diperkirakan.

*The UU HPP Amend a number of existing law, as follow:*

1. *The Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP);*
2. *The Income Tax Law (UU PPh);*
3. *The Law on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (UU PPN and PPnBM);*
4. *The Excise Law (UU Cukai);*
5. *Law No. 2 Year 2020;*
6. *Omnibus Law.*

*Each regulatory scope has different policy enforcement time., provisions related to PPh are effective from the 2022 Fiscal Year, provisions regarding VAT and carbon taxes are effective from April 1, 2022, the Voluntary Disclosure Program policy is valid from January 1, 2022 to June 30, 2022, while regulations regarding KUP and provisions regarding excise are effective from the date of promulgation.*

*As of the date of this audit report, the Entity are still currently evaluating the impact of PP No. 35 Tahun 2021. Such effects will be reported in the financial statements when they known and can be estimated.*

**31. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI**

Amandemen dan penyesuaian tahunan standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 22 (Amandemen 2020), mengenai "Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan".

**31. NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

*The standard annual amendments and adjustments that are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2022 are as follows:*

- *PSAK No. 22 (Amendment 2020), regarding "Business Combinations against references to the Financial Reporting Conceptual Framework".*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Amendemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

*Amendments to PSAK No. 22 clarifies the interaction between PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.*

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

*This amendment adds a description of the liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK No. 57 or ISAK No. 30, and clarify the contingent liabilities recognized at the acquisition date, and in relation to the definition of a contingent asset and its accounting treatment.*

- PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak".

- *PSAK No. 57 (Amendment 2019), regarding "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Contract Loss - Contract Fulfillment Costs".*

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

*This amendment classifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is an burdensome contract. This amendment provides that the cost of fulfilling the contract consists of costs that are directly related to the contract. Directly related costs consist of: incremental costs to fulfill the contract and allocations of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai "Agrikultur".

- *PSAK No. 69 (Improvement 2020), regarding "Agriculture".*

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen", menjadi "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen".

*This improvement clarifies the recognition and measurement that previously "the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest", to "the entity does not account for cash flows for financing assets, or regrowth of biological assets after harvest".*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai "Instrumen Keuangan".

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

- PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai "Sewa".

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

Amandemen standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Amandemen 2020), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang".

Amandemen PSAK No. 1 ini diadopsi dari Amandemen IAS No. 1: *Presentation of Financial Statements*. Amandemen tersebut mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

Amandemen tersebut juga terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;

- PSAK No. 71 (Improvement 2020), regarding "Financial Instruments".

PSAK No. 71 (Improvement 2020) clarifies fees (benefits) recognized by borrowers in relation to derecognition of financial liabilities. In determining the fee (return) to be paid after deducting the fee (return) received, the borrower only includes the fees (benefits) paid or received between the borrower and the lender, including fees (benefits) paid or received by either the borrower or the lender on behalf of other parties.

- PSAK No. 73 (Annual Improvement 2020), regarding "Leases".

PSAK No. 73 (Improvement 2020) clarifies the measurement by tenants and records changes in lease term related to "improvements to rental property".

The amended standards which became effective for financial statements beginning on or after January 1, 2023 are as follows:

- PSAK No. 1 (Amendment 2020), regarding "Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term".

Amendments to PSAK No. 1 was adopted from the IAS Amendment No. 1: *Presentation of Financial Statements*. The amendments clarify one of the criteria for classifying a liability as long-term, that is, it requires the entity to have the right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

The amendments also relate to the following:

- a. specifies that the entity's right to defer settlement of the liability must exist at the end of the reporting period;



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- b. mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menaguhkan penyelesaian liabilitas;
- c. mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi dan
- d. memperjelas persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.
- PSAK No. 1 (Amendemen 2021), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan yang Mengubah Istilah "Signifikan" Menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan Mengenai Kebijakan Akuntansi Material".
  - PSAK No. 16 (Amendemen 2021), mengenai "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensifikan".
- Secara umum, Amendemen PSAK No. 16 tersebut:
- a) Paragraf 17 (e) mengklasifikasi hal berikut:
- melarang pengurangan hasil neto penjualan setiap item yang dihasilkan, saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dari biaya pengujian (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik).
  - mengklarifikasi arti dari 'pengujian', yang menegaskan bahwa ketika menguji apakah suatu aset berfungsi dengan baik, suatu entitas menilai kinerja teknis dan kinerja fisik dari aset tersebut.
- b) Paragraf 20A menambahkan paragraph 20 A yang mengatur bahwa:
- entitas mengakui hasil penjualan dan
- b. clarify that the classification is not affected by management's intentions or expectations of whether the entity will exercise its right to suspend settlement of the liability;
- c. clarify how loan conditions affect classification and
- d. clarify the requirements for an entity to classify a liability based on its ability to settle the liability by issuing its own equity instruments.
- PSAK No. 1 (Amendment 2021), regarding "Presentation of Financial Statements that Change the Term "Significant" to "Material" and Provides Explanation of Material Accounting Policies".
  - PSAK No. 16 (Amendment 2021), regarding "Fixed Assets on Yield Prior to Intensified Use".
- In general, the amendments to PSAK No. 16:
- a) Paragraph 17 (e) classifies the following:
- prohibits deducting the net proceeds from the sale of each item produced, while bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intent, from the cost of testing (such as samples generated when testing whether the asset is functioning properly).
  - clarify the meaning of 'test', which confirms that when testing whether an asset is functioning properly, an entity assesses the technical performance and physical performance of the asset.
- b) Paragraph 20A adds paragraph 20A which provides that:
- the entity recognizes the proceeds from



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

- 
- biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dalam Laba Rugi.
- selanjutnya entitas mengukur biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK No. 14: Persediaan.
- c) Paragraf 74A menambahkan paragraf 74A yang mengatur jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan keuangan juga mengungkapkan:
- persyaratan sebelumnya dalam paragraf 74(d) tidak diubah tetapi telah dipindahkan ke paragraf 74A(a).
  - jumlah hasil dan biaya perolehan (yang masuk dalam L/R sesuai paragraf 20A) terkait item yang dihasilkan yang bukan merupakan output dari aktivitas normal entitas serta pengungkapan dalam pos mana dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup hasil dan biaya perolehan tersebut.
- PSAK No. 25 (Amendemen 2021), mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi “Estimasi Akuntansi” dan penjelasannya”.
  - PSAK No. 46 (Amendemen) mengenai “Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”. Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.
- the sale and cost of the items produced when bringing the property, plant and equipment to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intention in Profit and Loss.*
- *the entity then measures the cost of the item by applying the measurement requirements in PSAK No. 14: Inventories.*
- c) *Paragraph 74A adds paragraph 74A which provides that if not presented separately in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the financial statements also disclose:*
- *the previous requirement in paragraph 74(d) was not modified but has been moved to paragraph 74A(a).*
  - *the amount of proceeds and costs (which are included in the L/R in accordance with paragraph 20A) relating to items produced that are not an output of the entity's normal activities and the disclosure in which items in the statement of profit or loss and other comprehensive income include those results and costs.*
- *PSAK No. 25 (Amendment 2021), regarding “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors regarding the definition of “Accounting Estimates” and their explanations”.*
  - *PSAK No. 46 (Amendment 2021), regarding “Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”. This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in practice in the field for such transactions and similar transactions.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Standar baru yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, mengenai "Kontrak Asuransi".

PSAK No. 74 merupakan adopsi dari IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang berlaku efektif 1 Januari 2023. PSAK No. 74 ini telah mencakup relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amandemen IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang antara lain memberikan penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

Penerapan PSAK No. 74 Kontrak Asuransi akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdaya banding" (*comparable*) dengan industry-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK No. 62 Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS No. 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/Negara. Selain itu, PSAK No. 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Manajemen Entitas sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amandemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan.

*New standards which is effective for financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:*

- *PSAK No. 74, regarding "Insurance Contracts".*

*PSAK No. 74 is an adoption of IFRS No. 17: Insurance Contract effective January 1, 2023. PSAK No. 74 has included relaxation of several provisions as regulated in Amendments to IFRS No. 17: Insurance Contract which, amongst others, provides for additional scope exceptions, adjustments in the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.*

*Implementation of PSAK No. 74 The Insurance Contract will make the insurance company's Financial Statements "comparable" with other industries such as banking and other financial service companies due to PSAK No. 62 The current Insurance Contract (adoption of IFRS No. 4) still allows for varying reporting in each jurisdiction/country. In addition, PSAK No. 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, receive transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for protection products. insurance with investment features.*

*The management of the Entity is currently evaluating the impact of the new standards, amendments and improvements to standards on the financial statements.*



**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**(Continued)**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

---

**32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan yang telah diselesaikan pada tanggal 28 April 2023.

**32. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

*The management of the Entity is responsible for the preparation of the financial statements which were completed on April 28, 2023.*